

PORTOFOLIO
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, M.Pd.

Mega Metalia, S.E, M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 5

Qonita Nurul Izzah 2313031042

Rika Rahayu 2313031052

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ARTIKEL 1

A. Identitas Artikel

Judul Artikel	: Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
Publikasi	: Kompasiana
Tahun	: 2023
Penulis	: Muhammad Ali
Website	:
	https://www.kompasiana.com/image/muhammadqli/64e45f604addee716424b9d4/akuntansi-sektorpublik-pengelolaan-keuangan-yang-transparan-dan-akuntabel?page=1

B. Analisis Artikel

Akuntansi sektor publik adalah cabang ilmu akuntansi yang fokus pada pengelolaan keuangan pemerintahan, lembaga publik, dan organisasi nirlaba. Tujuan utamanya adalah mengatur dan mengawasi penggunaan dana publik yang berasal dari berbagai sumber, seperti pajak dan penerimaan negara lainnya. Pentingnya akuntansi sektor publik terletak pada kemampuannya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki negara. Peran utama akuntansi sektor publik adalah mengawasi dan melaporkan penggunaan dana publik. Transparansi menjadi pilar utama dalam praktik ini, yang memungkinkan masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana uang negara digunakan. Dengan demikian, masyarakat dapat yakin bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya dipergunakan secara bijaksana dan tepat sasaran.

Prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Prinsip pertanggungjawaban mewajibkan organisasi publik menjelaskan secara detail penggunaan dana. Prinsip keterbukaan dan transparansi mengharuskan informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi memungkinkan perbandingan laporan keuangan dari waktu ke waktu. Akuntabilitas menjadi prinsip penting lainnya dalam akuntansi sektor publik. Organisasi publik harus dapat menjelaskan setiap tindakan dalam mengelola dana publik. Laporan keuangan tidak hanya sekadar angka, tetapi harus memberikan pemahaman yang jelas tentang kinerja dan penggunaan dana. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan keuangan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Teknologi kini memainkan peran krusial dalam mengembangkan praktik akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi berbasis komputer memungkinkan pengolahan data keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Perangkat lunak akuntansi canggih dapat meminimalkan kesalahan manusia dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan. Ke depannya, akuntansi sektor publik akan semakin penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Integrasi teknologi, penerapan prinsip transparansi, dan komitmen untuk

akuntabilitas akan menjadi kunci keberhasilan. Masyarakat akan semakin kritis dan membutuhkan informasi yang jelas tentang penggunaan dana publik, sehingga akuntansi sektor publik akan terus berkembang menjadi instrumen pengawasan yang semakin canggih dan efektif.

C. Komentar Kelompok

Artikel ini memberikan penjelasan komprehensif tentang akuntansi sektor publik dengan bahasa yang relatif mudah dipahami. Kekuatan artikel terletak pada kemampuannya menjelaskan konsep kompleks secara sederhana, memperlihatkan hubungan antara pengelolaan keuangan publik dengan kepentingan masyarakat. Pembahasan tentang peran teknologi menambah dimensi modern dalam memahami akuntansi sektor publik, menunjukkan bahwa bidang ini terus berkembang mengikuti kemajuan zaman.

ARTIKEL 2

A. Identitas Artikel

Judul Artikel	: Regulasi dan Standar Akuntansi Publik
Publikasi	: Kompasiana
Tahun	: 2023
Penulis	: Bernadete Indah Kriestiana
Website	:
	https://www.kompasiana.com/bernadete05606/62d33feace96e569dd578be2/regulasi-dan-standar-akuntansi-publik

B. Analisis Artikel

Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan suatu standar yang digunakan untuk Menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan badan layanan umum. Secara umum SAP berbentuk regulasi pemerintah yaitu PP No. 71 tahun 2020 dan peraturan Menteri keuangan (PMK) untuk tambahan dan revisi. Sedangkan acuan standar internasional untuk akuntansi sektor public menggunakan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS).

C. Komentar Kelompok

Artikel tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai sektor publik dan pentingnya standar akuntansi dalam mengatur pelaporan keuangan pemerintah. Penjelasan mengenai SAP, dasar hukumnya melalui PP No. 71 serta kaitannya dengan standar internasional seperti IPSAS menunjukkan bahwa Indonesia sudah berupaya menyusun sistem pelaporan yang terstruktur, transparan, dan dapat dibandingkan secara global.

Walaupun ringkas, isi artikel sudah mencakup poin penting, namun akan lebih baik jika dilengkapi contoh penerapan atau tantangan implementasi SAP dalam praktik.

ARTIKEL 3

A. Identitas Artikel

Judul Artikel	: Masa Depan Akuntansi Sektor Publik Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan
Publikasi	: Kompasiana
Tahun	: 2024
Penulis	: Agus Arwani
Website	:
	https://www.kompasiana.com/agusarwani2024/66b1d30ac925c428aa6fc105/masadepan-akuntansi-sektor-publik-syariah-di-indonesia-tantangan-dan-peluang

B. Analisis Artikel

Artikel ini membahas masa depan akuntansi sektor publik syariah di Indonesia, mengungkapkan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utamanya bukan sekadar memenuhi kebutuhan agama, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman tentang akuntansi syariah, keterbatasan infrastruktur, dan belum adanya regulasi komprehensif. Banyak institusi pemerintah masih menggunakan sistem akuntansi konvensional dan belum siap beralih ke sistem syariah. Dibutuhkan upaya besar dalam edukasi, pelatihan, dan pengembangan sistem untuk mendukung transisi ini. Namun, artikel ini juga menyoroti sejumlah peluang menggembirakan. Dukungan pemerintah yang semakin kuat terhadap ekonomi syariah, meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip syariah, dan potensi kerjasama internasional menjadi modal penting. Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan akuntansi syariah di sektor publik, tidak hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga sebagai contoh bagi negara-negara muslim lainnya. Peran akademisi dan lembaga pendidikan ditekankan sebagai kunci keberhasilan. Mereka perlu mengintegrasikan kurikulum akuntansi syariah untuk mencetak generasi yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan sistem akuntansi sektor publik syariah yang inovatif dan berkelanjutan.

C. Komentar Kelompok

Artikel ini memberikan perspektif yang sangat menarik tentang pengembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kekuatan artikel terletak pada pembahasannya yang mendalam namun tetap komprehensif, mengungkapkan tantangan sekaligus peluang dengan cara yang konstruktif. Penulis berhasil menggambarkan kompleksitas transisi menuju sistem akuntansi syariah tanpa terkesan idealistik berlebihan. Artikel ini tidak hanya sekadar mengeluhkan masalah, tetapi juga menawarkan solusi praktis dan memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

Judul	:	Persepsi Akuntansi Sektor Akuntansi Pemerintahan
Nama Jurnal	:	Jurnal JIBEKA
Nama Penulis	:	Kariyoto
Vol, No, Halaman	:	Vol. 11, No. 1, Hal. 18 – 26
Tahun	:	2017

B. Analisis Jurnal

Persepsi yang disebarluaskan dalam pengajaran akuntansi pemerintahan Indonesia adalah akuntansi pemerintahan pengganti akuntansi sektor publik. Logika pengajaran disebarluaskan selalu dimulai dari bahasan pemerintahan yang bersih dan individu yang bersih. Definisi uang dalam pemerintahan yang bersih di Indonesia melibatkan hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dana konsolidasi serta dana pinjaman nasional dalam menyusun rencana anggaran (RAPBN/RAPBD) yang sesuai. Masalah yang ada, pada umumnya, sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih jelas pemerintah yang berkuasa, pemerintah negara, dan industri nasional perusahaan milik pemerintahan, badan hukum publik, perusahaan publik. Namun kata tersebut dirasa kurang tepat, sehingga frase pemerintah yang berkuasa masih menjadi perdebatan kontroversial dalam konteks demokrasi yang menyatakan bahwa rakyatlah yang paling berkuasa. Tujuan penulisan artikel ini menjelaskan pemahaman atau persepsi yang benar tentang akuntansi sektor publik. Tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik yang dikembangkan dalam kondisi yang berbeda. Kata kunci: persepsi, akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan.

Pemerintahan daerah dalam mekanisme pertanggungjawaban melalui standarisasi pelayanan publik, seperti pendidikan dan pelayanan sosial, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di sini terjadi pembagian tanggung jawab sebagai penentu standar regulator adalah DPRD, dan sebagai operator adalah Kepala Daerah yang menyediakan pelayanan yang diinginkan dengan tujuan dan tanggung jawab yang jelas. Pengaruh menteri dan departemen-departemen di pemerintah pusat masih terasa kuat dalam tahap perencanaan program. Tekanan kelompok-kelompok di daerah, seperti organisasi

massa di daerah, komisi perdagangan, kelompok-kelompok aksi, partai politik di daerah, LSM di daerah, dan lain-lain memberikan arahan terbatas untuk urusan daerah.

C. Komentar Kelompok

Dalam jurnal tersebut sudah dijelaskan bahwa kesadaran akan perlunya dikembangkan pelayanan publik, seperti telekomunikasi dan listrik, mulai diungkap di berbagai media massa. Kondisi ini diperkuat dengan semakin kuatnya tuntutan LSMLSM nasional maupun internasional terhadap mekanisme pelayanan publik. Munculnya studi akuntansi sektor publik di kurikulum nasional merupakan hal yang tepat untuk menjawab perubahan perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Secara teoritis, Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga lembaga tinggi negara dan departemen departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya. Dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapatkan: Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban kemasyarakatan. Akuntansi sektor publik di Indonesia, mencakup beberapa bidang utama.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 2

A. Identitas Jurnal

Judul	:	Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Nama Jurnal	:	Jurnal Akuntansi dan Pendidikan
Nama Penulis	:	Doddy Setiawan
Vol, No, Halaman	:	Vol. 8, No. 2, Hal. 94 – 116
Tahun	:	2019

B. Analisis Jurnal

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah charting the field. Sampel yang diambil berasal dari 22 jurnal terakreditasi di Indonesia dan diperoleh 137 artikel selama tahun 2010-2018. Penelitian ini mengklasifikasikan artikel berdasarkan topik dan metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa topik yang paling banyak digunakan dalam penelitian akuntansi sektor publik adalah topik mengenai akuntansi keuangan dan untuk model yang sering digunakan adalah metode kuantitatif dan juga metode survei serta archival. Topik akuntansi keuangan pada sektor publik menjadi topik terbanyak yang diteliti dikarenakan akuntansi pada sektor publik masih menjadi perhatian khusus dan masih banyak pemerintah daerah yang terkendala pelaporan keuangan.

Sementara itu dari topik penelitian yang paling sedikit dilakukan dari tujuh kategori adalah topik mengenai perpajakan dan sistem akuntansi. Penelitian ini mengklasifikasikan

setiap artikel berdasarkan topik dan metode penelitian. Topik penelitian dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu sistem akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, regulasi, audit, pajak dan topik lainnya. Tabel 4 menunjukkan bahwa 45% artikel akuntansi sektor publik didominasi oleh topik akuntansi keuangan. Sistem akuntansi 6%, akuntansi manajemen 10%, regulasi 9%, audit 16%, perpajakan 5%, lain-lain sebesar 9%. Topik yang termasuk dalam kategori sistem akuntansi adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI), E Government, Implementasi SAKIP, Sistem Informasi, Sistem Akuntansi Pemerintah dan Implementasi sistem E-Procurement. Dari keenam kategori topik sistem akuntansi sektor publik tersebut, SPI, E-Government dan Implementasi SAKIP mendominasi, namun secara keseluruhan keenamnya merata.

C. Komentar Kelompok

Dalam Jurnal tersebut sudah dijelaskan bahwa peneliti mengelompokkan setiap artikel pada dua klasifikasi yaitu topik dan metode penelitian dengan mengacu pada penelitian sebelumnya (Hesford et al., 2007). Penelitian ini menggunakan 137 artikel dari 22 jurnal terakreditasi nasional. Penelitian ini dilakukan pada artikel yang terbit dalam kurun waktu 9 tahun dari tahun 2010-2018 karena pada tahun-tahun tersebut penelitian mengenai akuntansi sektor publik mulai berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti pada 22 jurnal terakreditasi. Meskipun dalam dekade pertama, penelitian mengenai akuntansi sektor publik cenderung naik turun, namun dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

Judul	:	Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Frameworks
Nama Jurnal	:	Open Journal of Accounting
Nama Penulis	:	Carlos Juiz, Carlos Guerrero, Isaac Lera
Vol, No, Halaman	:	Vol. 3, No. 1, Hal. 9 – 27
Tahun	:	2014
DOI	:	http://dx.doi.org/10.4236/ojacct.2014.31003

B. Analisis Jurnal

Jurnal berjudul *Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Frameworks* membahas bagaimana penerapan tata kelola teknologi informasi dapat mendukung prinsip-prinsip good governance di sektor publik. Penulis menjelaskan bahwa organisasi publik membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif, dan hal ini dapat dicapai melalui framework IT governance seperti ISO/IEC 38500. Jurnal ini kemudian memperkenalkan model dFogIT sebagai kerangka implementasi yang menghubungkan standar tata kelola TI dengan praktik

nyata di sektor publik. Melalui studi kasus pada institusi pemerintah, penulis menunjukkan bahwa penerapan governance TI yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi pengelolaan anggaran TI, serta kualitas layanan publik. Kelebihan jurnal ini adalah memberikan konsep sekaligus contoh penerapan, namun kelemahannya terletak pada penggunaan satu studi kasus sehingga hasilnya kurang general. Secara keseluruhan, jurnal ini relevan bagi lembaga publik yang ingin meningkatkan tata kelola informasi agar lebih transparan, terukur, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Jurnal ini juga menekankan bahwa tata kelola TI bukan hanya soal penerapan sistem atau prosedur teknis, tetapi juga berkaitan dengan perilaku, budaya organisasi, dan komitmen pimpinan dalam memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Penulis menegaskan bahwa keberhasilan penerapan governance TI sangat bergantung pada dukungan manajemen puncak, kejelasan peran dan tanggung jawab, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Selain itu, jurnal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi pendorong transparansi publik melalui pelaporan digital, sistem informasi, dan mekanisme pengawasan berbasis data. Dengan demikian, hubungan antara tata kelola TI dan good governance bersifat saling mendukung: teknologi memperkuat akuntabilitas, sementara prinsip good governance memastikan teknologi dikelola dengan etis dan efektif.

C. Komentar kelompok

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya tata kelola TI dalam mendukung prinsip good governance di sektor publik. Pendekatan yang digunakan jelas, relevan, dan aplikatif, terutama karena disertai studi kasus nyata. Namun, cakupan penelitian yang terbatas pada satu institusi membuat hasilnya perlu diuji lebih luas agar dapat digeneralisasikan. Meskipun begitu, jurnal ini tetap bermanfaat sebagai referensi untuk memperkuat praktik tata kelola TI yang transparan dan akuntabel di lembaga publik.

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 2

A. Identitas Jurnal

Judul	:	Harmonizing Budgeting and Accounting: The Case of Italy
Nama Jurnal	:	Open Journal of Accounting
Nama Penulis	:	Andriana Bruno
Vol, No, Halaman	:	Vol. 3, No. 1, Hal. 38 – 44
Tahun	:	2014
DOI	:	http://dx.doi.org/10.4236/ojacct.2014.31005

B. Analisis Jurnal

Jurnal ini membahas proses reformasi keuangan publik di Italia, khususnya upaya penyelarasan antara sistem penganggaran dan sistem akuntansi dalam pemerintahan daerah. Penulis menjelaskan bahwa reformasi ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan pemerintah agar sesuai dengan standar internasional serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Artikel ini menyoroti peralihan dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual, serta tantangan yang muncul seperti kesiapan sumber daya manusia, perubahan prosedur administrasi, serta resistensi birokrasi. Selain itu, jurnal ini menunjukkan bahwa harmonisasi sistem penganggaran dan akuntansi dapat meningkatkan konsistensi data, perbandingan antar periode, dan pengawasan keuangan publik. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai proses reformasi, hasilnya masih terbatas pada konteks Italia sehingga penerapannya di negara lain perlu penyesuaian sesuai regulasi dan kondisi lokal. Namun secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan tata kelola keuangan publik dan menjadi referensi yang relevan untuk negara yang sedang melakukan modernisasi sistem akuntansinya.

Jurnal ini juga menekankan bahwa keberhasilan harmonisasi tidak hanya bergantung pada perubahan sistem dan regulasi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam hal pelatihan, koordinasi antar instansi, dan komitmen pemerintah. Penulis menegaskan bahwa reformasi akuntansi publik adalah proses jangka panjang yang memerlukan penyesuaian budaya birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur. Selain itu, artikel ini menunjukkan bahwa harmonisasi anggaran dan akuntansi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi fiskal, terutama dalam mendorong penggunaan data keuangan yang lebih akurat dan relevan bagi pengambilan kebijakan.

Selain itu, jurnal ini memberikan gambaran bahwa perubahan menuju sistem yang lebih harmonis seringkali tidak berjalan mulus karena adanya perbedaan persepsi, beban administrasi tambahan, dan kebutuhan adaptasi teknologi. Penulis juga menyoroti bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dukungan politik serta keberlanjutan kebijakan, bukan hanya desain teknis regulasi. Dengan kata lain, harmonisasi antara budgeting dan accounting bukan hanya reformasi teknis, tetapi juga reformasi manajerial dan institusional. Meskipun penelitian ini berfokus pada konteks Italia, temuan dan pembahasannya tetap relevan sebagai pembelajaran bagi negara lain yang sedang berupaya meningkatkan kualitas manajemen keuangan publik melalui modernisasi sistem pelaporan dan penganggaran.

C. Komentar Kelompok

Jurnal ini memberikan kontribusi yang baik dalam memahami proses harmonisasi antara sistem penganggaran dan akuntansi di sektor publik. Pembahasan disusun dengan jelas dan didukung analisis konteks yang relevan, terutama terkait tantangan implementasi reformasi akuntansi berbasis akrual. Meskipun penelitian ini terbatas pada studi kasus di Italia, temuan dan pendekatannya tetap bermanfaat sebagai referensi bagi negara lain yang sedang melakukan modernisasi sistem keuangan pemerintah. Jurnal ini dinilai informatif, aplikatif, dan mampu memberikan wawasan mengenai hubungan antara reformasi sistem keuangan publik dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

A. Identitas Laporan Keuangan

Nama Dokumen	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024
Jenis Laporan	:	Laporan Keuangan berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Penyusun Laporan	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Entitas Laporan	:	Pemerintah Pusat Republik Indonesia (gabungan seluruh Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum)
Tanggal Publikasi	:	21 Agustus 2025
Link Dokumen	:	LKPP-2024.pdf

B. Dasar Penyusunan

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Menteri Keuangan terkait penyusunan LKPP.

C. Komponen Laporan

- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - Neraca
 - Laporan Operasional
 - Laporan Arus Kas
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

D. Tujuan Penyusunan

Memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan APBN.

E. Ringkasan Isi Laporan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN selama tahun berjalan. Secara umum, realisasi pendapatan negara menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian di atas target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi belanja negara juga terealisasi mendekati pagu anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjalankan fungsi fiskal secara optimal dalam rangka mendukung program pembangunan serta layanan publik. Meskipun demikian, laporan ini juga menunjukkan adanya defisit anggaran yang terjadi karena belanja negara lebih besar dibanding pendapatan yang diterima. Defisit tersebut

ditutup melalui mekanisme pembiayaan, antara lain melalui penerbitan surat berharga negara dan sumber pembiayaan lainnya.

Dari sisi posisi keuangan, neraca pemerintah pusat mencerminkan komposisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah secara agregat. Aset pemerintah terdiri dari aset lancar, aset nonlancar, serta investasi jangka panjang yang sebagian besar berupa aset tetap dan infrastruktur publik. Di sisi lain, kewajiban pemerintah mencakup utang jangka pendek maupun jangka panjang yang sebagian besar berkaitan dengan pembiayaan defisit dan program pembangunan. Laporan Operasional menunjukkan bahwa secara akuntansi pemerintah mengalami defisit operasional yang mencerminkan perbedaan antara pendapatan operasional dan beban operasional pada basis akrual.

Secara keseluruhan, LKPP 2024 memberikan gambaran mengenai kinerja fiskal pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan yang diimbangi dengan pengelolaan anggaran secara akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas laporan melalui peningkatan sistem pelaporan dan transparansi fiskal. Laporan ini tidak hanya menjadi dasar evaluasi kinerja fiskal, tetapi juga menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan serta peningkatan tata kelola keuangan negara ke depannya.

F. Ringkasan Laporan Keuangan

1. LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi APBN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember TA 2024 (Audited)			(Rp Triliun)
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	2.802,46	2.850,60	101,72	2.783,93
Belanja Negara:	3.343,49	3.359,76	100,49	3.121,22
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.485,90	2.496,22	100,42	2.239,79
II. Transfer ke Daerah	857,59	863,54	100,69	881,43
Surplus (Defisit) Anggaran	(541,03)	(509,16)	94,11	(337,29)
Pembiayaan Neto	541,03	554,89	102,56	356,66
SILPA (SiKPA)		45,73		19,37

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Berikut merupakan ringkasan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024.

No	Uraian	31 Desember 2024		(Rp Triliun)
		(Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	
A	SAL awal	459,50		478,96
B	Penggunaan SAL		(56,38)	(35,00)
C	SILPA/SiKPA		45,73	19,38
D	Penyesuaian SAL		8,69	(3,84)
E	SAL akhir (A + B + C + D)		457,54	459,50

3. NERACA

Berikut merupakan ringkasan Neraca per 31 Desember 2024.

(Rp Triliun)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset		
Aset Lancar	906,11	894,41
Investasi Jangka Panjang	4.391,55	4.077,23
Aset Tetap	7.149,82	6.964,27
Properti Investasi	110,54	104,37
Piutang Jangka Panjang	48,62	49,19
Aset Lainnya	1.085,72	983,33
Total Aset	13.692,36	13.072,80
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	1.328,52	1.092,26
Kewajiban Jangka Panjang	8.940,49	8.444,42
Total Kewajiban	10.269,01	9.536,68
Ekuitas	3.423,35	3.536,12
Total Kewajiban dan Ekuitas	13.692,36	13.072,80

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
1	Pendapatan Operasional	3.115,26	3.083,37
2	Beban Operasional	3.353,60	3.111,67
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(238,34)	(28,30)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	22,68	59,92
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(215,66)	31,62

5. LAPORAN ARUS KAS

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Saldo Awal Kas	606,01	536,44
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(154,15)	(34,79)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(414,40)	(391,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	614,28	445,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	24,39	88,76
Kenaikan (Penurunan) Kas	70,12	108,14
Penggunaan SAL	(56,38)	(35,00)
Koreksi Pembukuan	9,26	(3,57)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penggunaan SAL dan Koreksi Pembukuan	23,00	69,57
Saldo Akhir Kas	629,01	606,01
Saldo Kas Pemerintah Lainnya	(199,34)	(175,30)
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	429,67	430,71

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
1	Ekuitas Awal	3.536,14	3.404,89
2	Surplus/Defisit LO	(215,66)	31,63
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	102,87	99,62
4	Transaksi Antar Entitas	-	-
5	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(112,79)	131,25
6	Ekuitas Akhir	3.423,35	3.536,14

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPP Tahun 2024 (*Audited*) memuat informasi antara lain sebagai berikut.

- a. Informasi mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

LKPP merupakan laporan konsolidasian yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan terdiri dari 86 LKKL dengan total 19.128 entitas akuntansi dan 1 LKBUN dengan total 789 entitas akuntansi yang tersebar di 10 satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

- b. Kebijakan Fiskal

Pada tahun 2024, Kebijakan Fiskal APBN diarahkan untuk "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan mempertimbangkan dinamika ketidakpastian global serta konsistensi dengan sasaran RPJMN Tahun 2022-2024.

- c. Ekonomi Makro

Berikut merupakan ringkasan realisasi asumsi dasar makro ekonomi sampai dengan 31 Desember 2024.

Indikator	Asumsi APBN 2024	Capaian 2024	Capaian 2023
Pertumbuhan Ekonomi (persen, y-on-y)	5,2	5,03	5,05
Inflasi (persen, y-on-y)	2,8	1,57	2,61
Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun (persen)	6,7	6,78	6,63
Nilai Tukar (rupiah per dolar AS)	15.000	15.847	15.255
Harga Minyak Mentah Indonesia (dolar AS per barel)	82	78,14	78,43
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	635	579,66	605,50
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.016,71	1.006,40

Sumber: Kementerian Keuangan (2024), Badan Pusat Statistik (2025), Bank Indonesia (2025), Kementerian ESDM (2025)

- d. Ikhtisar hasil pencapaian target keuangan berupa penjelasan mengenai hasil pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari kinerja pendapatan dan kinerja belanja APBN.

- e. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan LKPP Tahun 2024 mengacu kepada PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Selain itu, CaLK juga memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.